



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 620-631

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Materialitas pada Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan Milik Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

Kadek Dwianggra Ryasta^{1✉}, Dewa Gede Wirama²

Universitas Udayana

Email: dwikanggrar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan materialitas. Total terdapat empat variabel kontrol yang dioperasikan dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, *leverage*, komisar independen, dan tipe industri. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Terdapat 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, dengan total 95 amatan. Hasil analisis membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif pada pengungkapan materialitas.

Kata Kunci: *Pengungkapan Materialitas, Kepemilikan Pemerintah, Teori Legitimasi*

Abstract

This study is purpose to obtain empirical evidence of government ownership effect to the materiality disclosure. Four control variables were operated in this research, namely profitability, leverage, independent commissioner, and industry type. This research was conducted on all government-owned companies listed on Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. The sampling method uses the non-probability sampling method with purposive sampling techniques. There are 19 companies that met the sample criteria, with a total of 95 observations. The results of the analysis find that government ownership has a positive effect on materiality disclosure.

Keywords: *Materiality Disclosure, Government Ownership, Legitimacy Theory*

PENDAHULUAN

Isu mengenai keberlanjutan saat ini menjadi concern karena perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga memerhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya (Sherman, 2012). Keadaan ini terjadi karena para pemangku kepentingan khawatir akan bahaya dari proses bisnis dari suatu perusahaan dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan kontribusi mereka terhadap masalah perubahan iklim dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan (Acar et al., 2021). Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan beberapa prinsip agar memiliki kualitas tinggi. Salah satu prinsip penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan adalah materialitas (Jørgensen *et al.*, 2022). Prinsip materialitas merupakan prinsip utama dalam pelaporan keberlanjutan karena melalui prinsip ini perusahaan dapat menentukan isi laporan keberlanjutan (Mungoni, 2014).

Belakangan ini laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan cenderung mendapat kritik karena perusahaan hanya mengungkapkan kinerja positif tanpa mengungkapkan kinerja negatif mengenai keberlanjutan perusahaan (Patten, 2005). Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutannya. Namun, laporan yang diterbitkan oleh PwC (2022) menyebutkan bahwa hanya 54 persen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengungkapkan strategi mereka dalam melibatkan pemangku kepentingan pada proses penentuan materialitas laporan keberlanjutan. Padahal, GRI (2016) mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan penuh terkait pengungkapan materialitas laporan keberlanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan menentukan isu-isu material mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Fenomena ini mengakibatkan rendahnya kualitas dan relevansi laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan materialitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan melalui teori legitimasi. Teori legitimasi didefinisikan sebagai asumsi atau tanggapan umum atas langkah perusahaan yang diinginkan atau dipandang sesuai dengan beberapa nilai atau etika di masyarakat (Suchman & Mark C, 1995). Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan materialitas, seperti profitabilitas, leverage, dan komisaris independen (Caesaria & Yuliandhari, 2022; Farooq *et al.*, 2021; Fasan & Mio, 2016; Kurniawan & Astuti, 2021; Meutia *et al.*, 2022; Ngu & Amran, 2021; Putri *et al.*, 2022). Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan pemerintah sebagai bentuk keterbaruan karena penelitian yang membahas mengenai pengaruh

kepemilikan pemerintah pada pengungkapan materialitas masih tergolong terbatas. Penelitian ini juga mengoperasikan empat variabel kontrol yaitu, profitabilitas, *leverage*, komisar Independen, dan tipe industri. Berdasarkan teori legitimasi perusahaan milik pemerintah memiliki pengungkapan keberlanjutan yang lebih baik karena perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya didanai oleh dana publik yaitu pajak yang dibayarkan masyarakat (Gallo & Christensen, 2011). Selain itu, penggunaan variabel kepemilikan pemerintah menjawab penelitian Farooq *et al* (2021) yang menyarankan untuk mempertimbangkan dampak karakteristik perusahaan, seperti jenis kepemilikan terhadap pengungkapan materialitas.

Kepemilikan pemerintah merupakan sebuah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Semakin banyak persentase saham yang dimiliki pemerintah maka, pemerintah memiliki hak untuk mengendalikan pergerakan bisnis yang dilakukan manajemen sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah (Adiatma & Suryanawa, 2018). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai keberlanjutan mereka dibandingkan perusahaan milik swasta (Argento *et al.*, 2019). Hal ini disebabkan perusahaan yang milik pemerintah cenderung mendapatkan tekanan dan tuntutan yang lebih besar terhadap akuntabilitas karena perusahaan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat (Greiling *et al.*, 2015). Perusahaan milik pemerintah juga dipandang sebagai contoh bagi perusahaan lain maupun masyarakat tentang bagaimana menerapkan tanggung jawab perusahaan yang baik (Córdoba-Pachón *et al.*, 2014).

Penelitian Acar *et al.* (2021); Al Amosh & Khatib (2022); Khlif *et al.* (2017) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan keberlanjutan. Teori legitimasi menjelaskan penerbitan laporan keberlanjutan yang berkualitas merupakan salah satu tindakan yang diharapkan oleh masyarakat (Torelli *et al.*, 2020). Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan pemerintah akan meningkatkan praktik pengungkapan materialitas. Hal ini dikarenakan perusahaan milik pemerintah cenderung menghadapi tekanan yang lebih kuat dari masyarakat untuk memberikan contoh yang baik dalam melestarikan lingkungan (Argento *et al.*, 2019). Hal tersebut akan mendorong perusahaan (milik pemerintah) untuk mengungkapkan lebih banyak pengungkapan mengenai keberlanjutan (Chu *et al.*, 2013). Selanjutnya, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar mempunyai kapasitas untuk menampung lebih banyak aspirasi masyarakat mengenai keberlanjutan perusahaan, sehingga akan memengaruhi tingkat kualitas pengungkapan keberlanjutan serta meningkatkan legitimasi perusahaan (Al Amosh & Khatib, 2022).

H₁ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di perusahaan milik pemerintah yang tercatat di bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Data penelitian didapatkan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*) serta laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh melalui *website idx.co.id* serta laman resmi entitas terkait. Sampel ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dua standar yang meliputi, perusahaan infrastruktur dan transportasi di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dapat diakses, serta perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan menggunakan GRI *Standard*.

Penelitian ini mengoperasikan variabel dependen berupa pengungkapan materialitas (Y), variabel independen berupa kepemilikan pemerintah (X₁), serta variabel kontrol berupa profitabilitas (C₁), *leverage* (C₂), komisaris independen (C₃) dan tipe industri (C₄). Pengungkapan materialitas dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keberlanjutan yang disusun. Pengungkapan penilaian materialitas diukur dengan melakukan analisis konten dan pemberian skor 0-5 berdasarkan kualitas pengungkapan perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan mengacu pada penelitian Farooq *et al.* (2021) dengan kriteria seperti Table 1 berikut.

Tabel 1 Pengukuran variabel Pengungkapan Penilaian Materialitas

No.	Pengungkapan Penilaian Materialitas	Skor
1	Entitas tidak mencantumkan proses penilaian materialitas	0
2	Entitas menyatakan telah melakukan proses penilaian materialitas namun tidak terdapat penjelasan terkait proses yang dilakukan	1
3	Entitas menyajikan proses penilaian materialitas secara terbatas. Namun, tidak menyertakan matriks materialitas pada laporan keberlanjutan	2
4	Entitas menyajikan proses penilaian materialitas secara terbatas dan menyertakan matriks materialitas pada laporan keberlanjutan	3
5	Entitas melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas. Namun, tidak menyertakan matriks materialitas dalam laporan keberlanjutan	4
6	Entitas melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas, serta menyertakan matriks materialitas dalam laporan keberlanjutan	5

Kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan yang kepemilikan atau saham perusahaannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah. Kepemilikan pemerintah diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham milik pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots 1$$

Profitabilitas memberikan gambaran terkait potensi perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang dimilikinya. Melalui informasi tersebut perusahaan dapat menentukan keputusan tepat terkait Tindakan bisnisnya, termasuk dalam hal pengungkapan sukarela. Profitabilitas umumnya dihitung menggunakan rasio Return on Asset (ROA) sebagai berikut.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak dan Bunga}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 2$$

Leverage merupakan salah satu bentuk risiko keuangan perusahaan. Rasio *leverage* mengukur seberapa jauh perusahaan bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Rasio *leverage* yang semakin besar menggambarkan bahwa perusahaan sangat bergantung kepada utang, begitu pula sebaliknya. *Leverage* dihitung dengan Debt to Equity Ratio (DER) menggunakan formula berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots 3$$

Komisaris independen memiliki tanggung jawab atas kualitas informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab ini menjadikan komisaris independen memiliki peran penting dalam menjalankan mekanisme pengawasan terhadap proses penyusunan laporan perusahaan. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots 4$$

Tipe industri diklasifikasikan menjadi perusahaan yang termasuk industri high profile dan low profile. Pengukuran dari variabel ini menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian skor 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri high profile, yaitu perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Selanjutnya skor 0 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri low profile, yaitu keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retail, tekstil, dan produk rumah tangga

Data penelitian diperoleh dengan metode observasi non-partisipan. Selanjutnya data dianalisis melalui teknik regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Model yang digunakan pada penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 C_1 + \beta_3 C_2 + \beta_4 C_3 + \beta_5 C_4 + e \dots\dots\dots 3$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan Materialitas

α = Nilai Konstanta

X_1 = Kepemilikan pemerintah

C_1 = Profitabilitas

C_2 = *Leverage*

C_3 = Komisaris independen

C_4 = Tipe industri

e = *Standard Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui proses observasi awal, dapat diketahui bahwa perusahaan yang masuk ke dalam kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 19 perusahaan dengan total 95 observasi atau pengamatan. Adapun proses seleksi sampel dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2 Penentuan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di BEI	28
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan terintegrasi dan <i>sustainability report</i> pada periode 2018-2022.	(9)
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel	19
Jumlah Pengamatan selama tahun 2018-2022	95

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Materialitas	95	1,00	5,00	3,92	1,14
Kepemilikan Pemerintah	95	0,51	0,80	0,62	0,08
Profitabilitas	95	-0,58	0,60	0,02	0,10
<i>Leverage</i>	95	0,42	16,08	3,80	3,46
Komisaris Independen	95	0,00	0,80	0,45	0,14
Tipe Industri	95	0,00	1,00	0,74	0,44
Valid N (<i>listwise</i>)	95				

Sumber: Data Penelitian, 2024

Table 3 mengungkap bahwa total pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 95 observasi. Nilai *mean* pengungkapan penilaian materialitas perusahaan berada di angka 3,92 yang mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan milik pemerintah yang belum melakukan pengungkapan penuh terkait proses penilaian materialitas. Variabel kepemilikan

pemerintah memiliki *mean* 0,62 dan standar deviasi bernilai 0,08. Rata rata rasio profitabilitas sebesar 0,02 dan standar deviasi sebesar 0,10. Rata-rata rasio *leverage* penelitian ini adalah 3,80 dan standar deviasi sebesar 3,46. Rata rata persentase komisaris independen sebesar 0,45 dengan standar deviasi sebesar 0,14. Selanjutnya, nilai *mean* tipe industri sebesar 0,74 dengan standar deviasi 0,44.

Uji asumsi klasik diperlukan sebagai syarat dalam analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menjalankan dua jenis uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	95
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,002 ^c
<i>Monte carlo Sig. (2-tailed)</i>	0,133 ^d

Sumber: Data Penelitian, 2024

Mengacu pada Tabel 4, diperoleh nilai *Monte carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,133. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	t	
1 <i>(Constant)</i>	0,276	0,164		1,678	0,097
Kepemilikan Pemerintah	0,070	0,174	0,045	0,402	0,689
Profitabilitas	0,277	0,208	0,143	1,332	0,186
<i>Leverage</i>	-5,224	0,010	-0,001	-0,005	0,996
Komisaris Independen	-0,007	0,157	-0,005	-0,042	0,966
Tipe Industri	0,007	0,080	0,015	0,084	0,933

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 6 menunjukkan tingkat signifikansi variabel independen secara statistik tidak terdapat variabel yang mempengaruhi nilai absolut residual dengan nilai signifikansi melebihi taraf 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,348 ^a	0,121	0,071	0,32963

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 7 ditemukan nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,071 yang dapat diinterpretasikan bahwa 7,1 persen pengungkapan materialitas dapat ditentukan oleh variabel bebas yang dioperasikan dalam penelitian. Sementara itu, 92,9 persen pengungkapan materialitas disebabkan oleh hal lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 8 Uji Kelayakan Model

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1,329	5	0,226	2,446	0,040 ^b
	<i>Residual</i>	9,670	89	0,109		
Total		10,999	94			

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan nilai F sebesar 2,446 dengan signifikansi 0,040. Nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model ini dapat dan layak digunakan dalam penelitian dan semua variabel bebas yang meliputi kepemilikan pemerintah, profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan tipe industri berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan materialitas.

Table 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	1,592	0,268		5,932	0,000
	Kepemilikan Pemerintah	0,766	0,285	0,285	2,691	0,008
	Profitabilitas	-0,591	0,340	-0,177	-1,740	0,085
	<i>Leverage</i>	-0,001	0,017	-0,009	-0,051	0,960
	Komisaris Independen	0,201	0,256	0,085	0,788	0,433
	Tipe Industri	0,027	0,131	0,035	0,205	0,838

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil regresi linear berganda ditemukan bahwa profitabilitas, *leverage*, Komisaris Independen, dan tipe industri tidak berpengaruh pada pengungkapan

materialitas laporan keberlanjutan. Sesuai hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada pengungkapan materialitas. Berdasarkan Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Acar *et al.* (2021); Al Amosh & Khatib (2022); Khlif *et al.* (2017) serta teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat yang menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan materialitas untuk mengurangi eksposur mereka terhadap tekanan sosial serta meningkatkan legitimasi masyarakat (Meutia *et al.*, 2022). Kepemilikan pemerintah yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham pemerintah memiliki proaktivitas lingkungan yang lebih unggul (Calza *et al.*, 2014).

Perusahaan milik pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terkait kualitas dari laporan keberlanjutan melalui pengungkapan materialitas karena perusahaan milik pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya bersumber dari dana masyarakat (pajak yang dibayarkan) (Argento *et al.*, 2019). Maka perusahaan milik pemerintah akan melakukan pengungkapan penuh terkait materialitas guna meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, selanjutnya juga akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan milik pemerintah juga dianggap sebagai contoh bagi perusahaan lain maupun masyarakat tentang bagaimana melakukan pengungkapan keberlanjutan yang baik (Córdoba-Pachón *et al.*, 2014). Hal ini karena perusahaan milik pemerintah berada dibawah pengawasan dari pemerintah yang seharusnya juga mengikuti arahan atas aturan yang diterbitkan pemerintah yaitu POJK No. 51/2017. Sehingga pengungkapan materialitas berkualitas tinggi pada perusahaan milik pemerintah, akan mendorong peningkatan kualitas laporan keberlanjutan secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Melalui hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pengungkapan materialitas.

Pengukuran variabel pengungkapan penilaian materialitas dalam penelitian ini berbentuk skor yang cukup rentan bersifat subjektif, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran lain yang lebih pasti seperti *index GRI Standard*. Berdasarkan hasil uji *Adjusted R-squared* variabel independen yang dioperasikan dalam penelitian ini

hanya mampu menjelaskan variabel pengungkapan materialitas sebesar 7,1%. Hal tersebut berarti masih ada 92,9% indikator lain yang mampu menjelaskan pengungkapan materialitas. Maka, penelitian berikutnya disarankan mengoperasikan variabel lain misalnya pelibatan pemangku kepentingan serta jenis kepemilikan perusahaan lainnya seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, E., Tunca Çalıyurt, K., & Zengin-Karaibrahimoglu, Y. (2021). Does ownership type affect environmental disclosure? *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 13(2), 120–141. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-02-2020-0016>
- Adiatma, K. B., & Suryanawa, I. K. (2018). Pengaruh Tipe Industri, Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas Terhadap Sustainability Report. *E-Jurnal Akuntansi*, 934. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p05>
- Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2022). Ownership structure and environmental, social and governance performance disclosure: the moderating role of the board independence. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 2(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/jbsed-07-2021-0094>
- Argento, D., Grossi, G., Persson, K., & Vingren, T. (2019). Sustainability disclosures of hybrid organizations: Swedish state-owned enterprises. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 505–533. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2018-0362>
- Caesaria, F. C., & Yuliandhari, W. S. (2022). Pengaruh Dewan Direksi, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penilaian Materialitas Laporan Keberlanjutan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 345–356. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.457>
- Calza, F., Profumo, G., & Tutore, I. (2014). Corporate Ownership and Environmental Proactivity. *Business Strategy and the Environment*, 25(6), 369–389. <https://doi.org/10.1002/bse.1873>
- Chu, C. I., Chatterjee, B., & Brown, A. (2013). The Current Status of Greenhouse Gas Reporting by Chinese Companies. *Managerial Auditing Journal*, 28(2), 114–139.
- Córdoba-Pachón, J. R., Garde-Sánchez, R., & Rodríguez-Bolívar, M. P. (2014). A Systemic View of Corporate Social Responsibility (CSR) in State-Owned Enterprises (SOEs). *Knowledge and Process Management*, 21(3), 206–219. <https://doi.org/10.1002/kpm.1453>
- Farooq, M. B., Zaman, R., Sarraj, D., & Khalid, F. (2021). Examining the extent of and drivers for materiality assessment disclosures in sustainability reports. *Sustainability*

- Accounting, Management and Policy Journal*, 12(5), 965–1002.
<https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2020-0113>
- Fasan, M., & Mio, C. (2016). Fostering Stakeholder Engagement: The Role of Materiality Disclosure in Integrated Reporting. *Business Strategy and the Environment*, 26(3), 288–305. <https://doi.org/10.1002/bse.1917>
- Gallo, P. J., & Christensen, L. J. (2011). Firm size matters: An empirical investigation of organizational size and ownership on sustainability-related behaviors. *Business and Society*, 50(2), 315–349. <https://doi.org/10.1177/0007650311398784>
- Greiling, D., Traxler, A. A., & Stötzer, S. (2015). Sustainability reporting in the Austrian, German and Swiss public sector. *International Journal of Public Sector Management*, 28(4–5), 404–428. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2015-0064>
- GRI. (2016). *G3 Sustainability Reporting Guidelines*. <http://globalreporting.org/guidelines/2002.asp>
- Jørgensen, S., Mjøs, A., & Pedersen, L. J. T. (2022). Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(2), 341–361. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2021-0009>
- Khelif, H., Ahmed, K., & Souissi, M. (2017). Ownership structure and voluntary disclosure: A synthesis of empirical studies. *Australian Journal of Management*, 42(3), 376–403. <https://doi.org/10.1177/0312896216641475>
- Kurniawan, E., & Astuti, R. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Leverage Dan Growth Terhadap Tingkat Materialitas Sustainability Report Industri. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 72–90.
- Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder or Legitimacy Theory? The Rationale behind a Company's Materiality Analysis: Evidence from Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/su14137763>
- Mungoni, T. B. (2014). *Stakeholder Engagement in the determination of materiality for sustainability reporting* (Issue November) [University of Pretoria]. <http://hdl.handle.net/2263/44918>
- Ngu, S. B., & Amran, A. (2021). Materiality disclosure in sustainability reporting: Evidence from Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(1), 225–252. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no1.9>
- Patten, D. M. (2005). The accuracy of financial report projections of future environmental capital expenditures: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 30(5), 457–468. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.06.001>

- Putri, I. H., Meutia, I., & Yuniarti, E. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Materialitas pada Laporan Keberlanjutan. *E-JURNAL AKUNTANSI*, 32(7), 1771–1784. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- PWC. (2022). *Tren dan Arah Sustainability Report Indonesia di Masa Mendatang*. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/indonesian/tren-dan-arrah-sustainability-report-indonesia-di-masa-mendatang.html>
- Sherman, W. R. (2012). The Triple Bottom Line: The Reporting Of “Doing Well” & “Doing Good.” *Journal of Applied Business Research*, 28(4), 673–681. http://resolver.lrc.macewan.ca/macewan?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%253Aabiglobal&atitle=The+Triple+Bottom+Line%253A+The+Reporting+Of+%2522Doing+Well%2522+%2526+%2522Doing+Good%2522&title=Journal
- Suchman, & Mark C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20.
- Torelli, R., Balluchi, F., & Furlotti, K. (2020). The materiality assessment and stakeholder engagement: A content analysis of sustainability reports. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 470–484. <https://doi.org/10.1002/csr.1813>